

DAFTAR PUSTAKA

- _____. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- _____. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- _____. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- _____. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 123–138.
- Agnecia, H., Simbolon, U., Kurniawan, C. H., Ekonomi, F., Atma, U., & Yogyakarta, J. (2015). Pengaruh karakteristik pemerintah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 4(2), 54–70.
- Amaliah, E. F. (2019). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–13.
- Andriani, M., Santi, E., & Mustika, R. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2014-2016. *Akuntansi dan Manajemen*, 14(1), 1–14.

- Arifin, J. (2018). Potential factors to enhance the level of disclosure within financial statements of Indonesian provincial governments. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 20(2), 89–98.
- Budiarto, D. S., & Indarti, L. (2019). Apakah karakteristik pemerintah daerah berpengaruh pada pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah? riset pada kabupaten di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 12(1).
- Cahyono, Y. T. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.
- Marsella, C., & Aswar, K. (2019). An investigation of financial statement disclosure in local government financial statements. *International Journal of Business and Economic Affairs*, 4(6), 273–281.
- Feriyanti, M., Hermanto, & Suransi, N. K. (2015). Determinan kepatuhan pada ketentuan pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal InFestasi*, 11(2), 171–185.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, S.S. (2016). *Teori akuntansi*. Edisi revisi 2011. PT Raja Grafindo Persada.
- Haryadi, E. S., Ratnawati, V., & Kamaliah. (2015). Analisis pengungkapan (Disclosure) laporan keuangan kabupaten yang meraih opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP) dua tahun berturut-turut. *Akuntansi*, 3(2), 184–195.
- Hendriyani, R., & Tahar, A. (2015). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 22(1), 25–33.
- Heri. (2017). *Teori akuntansi: Pendekatan konsep dan analisis*. Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Hilmi, A. Z., & Martani, D. (n.d.). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi. *Journal of Accounting and Public Police*, 1–26.
- Ilmiyyah, N. M., Dewata, E., & Sarikadarwati. (2017). Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 5(1), 147.
- Keerasuntonpong, P., Dunstan, K., & Khanna, B. (2015). Factors influencing disclosures of statements of service performance of New Zealand local authorities. *Pacific Accounting Review*, 27(3), 304–328.
- Khasanah, N. L., & Rahardjo, S. N. (2014). Pengaruh karakteristik, kompleksitas, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(3), 1–11.
- Lesmana, S. I. (2010). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan wajib di Indonesia. Tesis. FE UNS. Surakarta.
- Liza, W. J., & Arza, F. I. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan sukarela laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 959–977.
- Lutfia, F. I., Maryono, & Bagana, B. D. (2018). Determinan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (Studi kasus pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2014-2016). *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 7(1), 82–95.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi sektor publik*. Edisi Revisi. UII Press.
- Maulana, C., & Handayani, B. D. (2015). Pengaruh karakteristik, kompleksitas pemerintahan dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. *Accounting Analysis Journal*, 4(4), 1–11.
- Novia, S., Fefri Indra Arza, & Agustin, H. (n.d.). Studi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan pemerintah (Studi empiris pada DPRD dan

SKPD kota Padang). *Simposium Nasional Akuntansi XII Palembang 2009*.

- Ntim, C. G., Soobaroyen, T., & Broad, M. J. (2017). Governance structures, voluntary disclosures and public accountability: The case of UK higher education institutions. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 30(1), 65–118.
- Pandansari, T. (2016). Tingkat ketergantungan, kompleksitas pemerintah, dan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19(3), 463.
- Patrick, P. (2007). The determinants of organizational innovativeness: The adoption of GASB 34 in Pennsylvania local government. *May*, 36.
- Puspita, R., & Martani, D. (2012). Analisis pengaruh kinerja dan karakteristik pemda terhadap tingkat pengungkapan dan kualitas informasi dalam website pemda. 84(1), 0–25.
- Rafida, Ridwan, Abdullah, M. I., & Yamin, N. Y. (2019). Pengaruh intergovernmental revenue, kekayaan pemerintah daerah dan umur pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (Survei pada pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Tengah). *Jurnal Akun Nabelo: Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 1(2), 63–70.
- Ramdhani, D. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di provinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 9(2), 146–161.
- Sari, I. P. (2016). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, PAD, leverage, dana perimbangan dan ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi pada kab/kota pulau Sumatra). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 679–692.
- Sarwono, J. (2017). *Mengenal prosedur-prosedur populer dalam SPSS 23*. Elex Media Komputindo.

- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154–170.
- Suhardjanto, D., & Yulianingtyas, R. R. (2011). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kepatuhan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(1), 1–94.
- Suryadi, P. T. (2018). Pengaruh kekayaan daerah (PAD), total aset, jumlah penduduk, tingkat ketergantungan, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *I(1)*, 21–30.
- Waliyyani, G. M., & Mahmud, A. (2015). pengaruh karakteristik pemerintah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 4(2), 1–8.